



GINA SITI RAHMAH, ANDI SUWIRTA & MOCH ERYK KAMSORI

Kedudukan dan Peranan Politik Harmoko pada Masa Orde Baru, 1983-1999: Dari Menteri Penerangan hingga Ketua Parlemen di Indonesia

IKHTISAR: Artikel ini – dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode sejarah, dan tinjauan pustaka – mengkaji tentang karier Harmoko dalam bidang politik. Harmoko memulai kariernya sebagai wartawan di surat kabar “Merdeka” dan memimpin surat kabar “Pos Kota” di Jakarta. Ketika sebagai Menteri Penerangan, Harmoko mengeluarkan kebijakan SIUPP (Surat Izin Usaha dan Penerbitan Pers); dan dianggap membelenggu kebebasan pers di Indonesia. Harmoko mampu melakukan komunikasi politik yang khas untuk mendukung program-program pembangunan Orde Baru. Ketika menjadi Ketua Umum GOLKAR (Golongan Karya), Harmoko berhasil memenangkan kekuatan politik itu dalam PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1997. Sebagai Ketua MPR/DPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat), Harmoko pada mulanya menetapkan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Namun, akibat tekanan dari gerakan Reformasi 1998, Harmoko pula yang meminta agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

KATA KUNCI: Harmoko; Pers Bebas dan Bertanggungjawab; Komunikasi Politik; Pemianan Politik.

ABSTRACT: “Position and Political Role of Harmoko during the New Order, 1983-1999: From the Minister of Information to the Chair of Parliament in Indonesia”. This article – using a qualitative approach, historical method, and literature review – examines Harmoko’s career in politics. Harmoko started his career as a journalist for the newspaper of “Merdeka” (Freedom) and led the newspaper of “Pos Kota” (City Post) in Jakarta. When as Minister of Information, Harmoko was issuing a policy of SIUPP (Business License and Press Issuance); and was considered to be shackling press freedom in Indonesia. Harmoko made distinctive political communications to support the New Order development programs. When he became the Chairman of GOLKAR (Functional Group), Harmoko succeed to win this political force in the 1997 General Election. As Chairman of the MPR/DPR (People’s Consultative Assembly/ People’s Representative Council), Harmoko initially re-appointed Suharto as President of Indonesia. However, due to pressure from the Reform movement in 1998, Harmoko also asked Soeharto to step down from his position as President of the Republic of Indonesia.

KEY WORD: Harmoko; Free and Responsible Press; Political Communication; Political Game.

About the Authors: Gina Siti Rahmah, M.Pd. adalah Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154; dan sekarang bekerja sebagai Guru Sejarah di SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) 5 Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Andi Suwirta, M.Hum. dan Moch Eryk Kamsori, S.Pd. adalah Dosen di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: ginasitirahmah91@gmail.com dan atriwusidna@gmail.com

Suggested Citation: Rahmah, Gina Siti, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori. (2020). “Kedudukan dan Peranan Politik Harmoko pada Masa Orde Baru, 1983-1999: Dari Menteri Penerangan hingga Ketua Parlemen di Indonesia” in *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Volume 8(2), September, pp.137-158. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808 (print) and ISSN 2684-7388 (online).

Article Timeline: Accepted (July 17, 2020); Revised (August 17, 2020); and Published (September 30, 2020).

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru, 1966-1998, pemerintahan dipegang oleh Presiden Soeharto. Untuk membuat pemerintah Orde Baru terus berdiri, Presiden Soeharto mengendalikan politik Indonesia melalui ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrasi, GOLKAR (Golongan Karya), dan juga pers. Dalam mengendalikan pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto terus mencari orang yang dapat diandalkan dan bekerja sama untuk terus mempertahankan Orde Baru dengan berbagai cara. Salah satu orang yang dipercayai oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru adalah Harmoko (Rajab, 2004; Siddiq, 2019; dan Utama & Dewi, 2019).

Harmoko merupakan orang yang sangat loyal kepada Presiden Soeharto, sehingga seringkali menurut pada perintah Presiden dengan membuat kebijakan yang kontroversi dan tidak menunjukkan adanya kehidupan yang demokratis. Untuk mengetahui kedudukan dan peranan politik Harmoko pada masa Orde Baru, penulis akan mengkaji melalui analisis biografi tokoh, yang pada masa akhir pemerintahan Orde Baru sering diejek namanya oleh kalangan pers, mahasiswa, dan masyarakat luas sebagai HARMOKO atau “Hari-hari Omong Kosong” (Administrator, 2003; Simanjuntak, 2003; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Melalui analisis biografi dapat terlihat bagaimana latar belakang kehidupan Harmoko dan bagaimana kepribadian Harmoko terbentuk. Dalam konteks ini, Harmoko (2009) sendiri, menulis pengalaman hidupnya tentang bagaimana keadaan keluarga, yang mempengaruhi minat dan bakat yang muncul dalam dirinya. Minat Harmoko terhadap dunia jurnalis dipengaruhi oleh ayah Harmoko, yaitu Asmo Prawiro, yang sering membelikan buku-buku bacaan untuk Harmoko. Harmoko sewaktu kecil sering mencuri

bacaan dari koran dan media massa yang dibaca ayahnya, sehingga minat Harmoko terhadap jurnalistik mulai muncul, yaitu saat ia kelas 3 SR (Sekolah Rakyat), atau SD (Sekolah Dasar) sekarang; dan Harmoko kecil sudah bercita-cita untuk menjadi seorang wartawan (Djamily, 1985; Busye & Rujito, 1989; Harmoko, 2009:5; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Cita-cita Harmoko sepertinya terwujud, bahkan lebih dari yang ia inginkan. Harmoko berhasil menjadi seorang wartawan; bahkan pada perkembangannya, Harmoko ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Penerangan, 1984-1998. Menurut Taufik Abdullah (2003), dan sarjana lainnya, pada waktu Harmoko sebagai Menteri Penerangan, ia mengeluarkan Peraturan No.1/PER/MENPEN/1984 tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Peraturan Menteri Penerangan ini banyak menimbulkan masalah dalam bidang penerbitan pers. Selain menjadi Menteri Penerangan, Harmoko juga ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) GOLKAR di Jakarta (Abdullah, 2003:411; Administrator, 2003; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Dalam memimpin GOLKAR, Harmoko melakukan komunikasi politik “sambung rasa”, yakni melalui temu kader yang dilakukannya langsung ke daerah-daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, Azwar (2009), dan sarjana lainnya, memaparkan bahwa dalam pandangan Harmoko, “temu kader” adalah wahana untuk mengembangkan komunikasi dan pendidikan politik; serta menyampaikan gagasan dan program-program pembangunan Orde Baru, yang mengacu pada amanat MUNAS (Musyawarah Nasional) V GOLKAR. Temu kader ini menuai pro-kontra, karena dianggap kampanye terselubung. Melalui temu kader ini

pula, Harmoko memenangkan GOLKAR dalam PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1997 (Harmoko, 1985; Azwar, 2009:86; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Harmoko, dalam memimpin GOLKAR, juga mencalonkan kembali Soeharto untuk menempati posisi Presiden yang ke-7 kalinya pada tahun 1998. Menurut Firdaus Syam (2008), dan sarjana lainnya, sebelum Soeharto di calonkan kembali menjadi Presiden, ia sempat mengatakan akan *lengser keprabon* (mundur sebagai penguasa), karena sudah tua dan meminta Harmoko untuk meneliti kembali: apakah ia masih pantas menjadi Presiden dan mendapat dukungan rakyat? Istilah yang digunakan oleh Soeharto memang sulit ditebak, karena mengandung makna lain dari budaya Jawa. Oleh karena itu, Harmoko, seusai RAPIM (Rapat Pimpinan) GOLKAR, tetap memberikan dukungan agar Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia (Syam, 2008:33-34; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Abdulsalam, 2017).

Dalam perjalanan selanjutnya, karier politik Harmoko terus berkembang. Ia diangkat menjadi Ketua MPR/DPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat) oleh Presiden Soeharto. Sebagai Ketua MPR/DPR, Harmoko juga – seperti sudah disebutkan tadi – menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kalinya. Namun, akibat dari tuntutan gerakan Reformasi pada tahun 1998, Harmoko pula yang akhirnya meminta Soeharto agar berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Menurut A.M. Makka (2008), dan sarjana lainnya, dalam pandangan Harmoko bahwa Pimpinan Dewan MPR/DPR, baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua, mengharapakan – demi persatuan dan kesatuan bangsa – agar Presiden Soeharto, secara arif dan bijaksana, sebaiknya mengundurkan diri (Sekjen DPR RI, 1999; Makka,

2008:26; dan Rizal, 2020).

Dari berbagai keputusan Harmoko dalam menentukan politik Indonesia itu banyak menuai pro-kontra, karena dianggap tidak demokratis dan terlalu loyal kepada penguasa Orde Baru. Namun, di akhir pemerintahan Orde Baru, Harmoko pula termasuk orang yang turut menentukan berakhirnya rejim Orde Baru, dengan keputusannya didalam DPR/MPR untuk meminta Soeharto agar mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia (Febriyanti, 2016; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Rizal, 2020).

Harmoko, dengan demikian, merupakan tokoh yang ikut menentukan arah politik Indonesia pada masa Orde Baru, melalui kebijakan-kebijakannya yang banyak menuai pro dan kontra. Kedudukan dan peranan Harmoko dalam dunia perpolitikan di Indonesia juga terbilang bertahan lama, yaitu dari tahun 1983 hingga tahun 1999 (Schwarz, 1999; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; Rizal, 2020).

Adalah menarik untuk mengetahui kedudukan dan peranan politik Harmoko melalui analisis biografi. Melalui analisis biografi, penulis bisa membandingkan biografi yang telah ada dan mencantumkan fakta dan data yang dapat dipercaya, karena seperti yang dipaparkan di atas, Harmoko merupakan orang yang menuai pro-kontra, sehingga buku atau biografi yang membahas Harmoko benar-benar harus dianalisis secara objektif dan seimbang, mengingat banyak mengandung aspek-aspek subjektivitasnya (Syam, 2008; Harmoko, 2009; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Dalam kajian ini, penulis menggunakan ilmu bantu lain, yaitu: ilmu politik, komunikasi, dan psikologis. Penulis memilih konsep-konsep yang berhubungan dengan: definisi biografi, demokrasi, perwakilan politik, partai politik, dan departemen

penerangan. Dan juga memilih teori yang sesuai dengan kajian penulis, yaitu Teori Kepribadian, Komunikasi Politik, Media Massa sebagai Sumber Pengaruh Politik, Elite Politik dan Komunikasi Politik, serta konsep lainnya yang dianggap relevan dan dapat dijadikan landasan dalam mengkaji ini (cf Irianto, 2014; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Kartodirdjo, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan, secara umum, adalah pendekatan kualitatif, metode sejarah, dan tinjauan pustaka (Creswell, 2008; Zed, 2008; dan Sjamsuddin, 2016). Dalam konteks menggunakan metode penelitian sejarah, penulis melakukan empat langkah, sebagai berikut:

Pertama, *Heuristik*. Ini adalah usaha untuk memilih suatu subjek dan mengumpulkan informasi tentang subjek tersebut. Pengumpulan sumber yang dilakukan adalah dengan mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis yang relevan, yang diperoleh dari buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber-sumber internet (Ismaun, 2005:34; Gottschalk, 2008:42; dan Sjamsuddin, 2016). Untuk itu, Penulis mengunjungi Perpustakaan Nasional di Jakarta; Perpustakaan Batoe Api di Bandung; Perpustakaan UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung; Perpustakaan Ali Alatas di Jakarta; Perpustakaan CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) di Jakarta, Perpustakaan Departemen Pendidikan Sejarah UPI di Bandung; Arsip Nasional di Jakarta; Toko Buku Palasari, Gramedia, dan Toko Buku Online di www.bukalapak.com di Bandung; serta Perpustakaan milik pribadi dan teman-teman di Bandung.

Kedua, *Kritik*. Ini adalah kegiatan menguji secara kritis kebenaran yang terdapat dalam data-data ataupun sumber-sumber yang

telah ditemukan sebelumnya. Kritik sumber dilakukan untuk mengetahui sumber yang digunakan sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, Ismaun (2005), dan sarjana lainnya, menyatakan bahwa kritik sumber dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Kritik Eksternal, yang merupakan kritik yang dilakukan untuk melihat otentisitas sumber sejarah, dimana didalam Kritik Eksternal itu juga dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal dokumen, peneliti, penerbit, dan lain sebagainya; serta Kritik Internal, yaitu kritik terhadap sumber untuk menilai kredibilitas dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggungjawab penulis dan moralnya (Ismaun, 2005:50; Kuntowijoyo, 2008; dan Sjamsuddin, 2016).

Ketiga, *Interpretasi*. Ini adalah tahapan penelitian sejarah yang dilakukan setelah pengumpulan sumber dan melakukan kritik terhadap sumber yang didapatkan. Interpretasi dilakukan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan dari berbagai sumber. Menginterpretasikan fakta-fakta dan sumber-sumber sejarah juga dalam suatu pemahaman baru yang dihubungkan dengan berbagai pendapat yang ada, termasuk dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu seperti pendekatan dari ilmu politik, ilmu komunikasi, dan psikologi (Sjamsuddin, 2016; Nasution, 2017; dan Kartodirdjo, 2018).

Keempat, *Historiografi*. Ini adalah tahap penulisan sejarah. Setelah hasil interpretasi didapatkan, tahap akhir penelitian yang dilakukan adalah menuliskan hasil interpretasi tersebut dalam suatu karya ilmiah. Seluruh hasil penelitian, berupa data dan fakta yang telah mengalami proses sebelumnya, dituangkan dalam suatu bentuk tulisan. Laporan penelitian dalam penulisan sejarah, yang biasa disebut sebagai “historiografi”, mengacu pada ketentuan

dan penulisan karya ilmiah yang betul (Zed, 2008; Sjamsuddin, 2016; Kartodirdjo, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmoko merupakan seorang tokoh, yang berkecimpung dalam bidang pers dan politik di Indonesia. Kedudukan dan peranan Harmoko, baik dalam bidang pers maupun politik di Indonesia pada masa Orde Baru, sangat besar karena ia harus memutuskan kebijakan dalam kepemimpinannya yang saling berkaitan. Karier Harmoko, baik dalam dunia pers maupun politik, tidak lepas dari latar belakang kehidupannya yang panjang (Administrator, 2003; Nugraha, 2015; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Menurut A. Lopez (1997), dan sarjana lainnya, Harmoko mempunyai *hobby* dan bakat mendalang yang diwarisi ayahnya, Asmo Prawiro (almarhum), seorang petani yang konon pernah memimpin perkumpulan wayang orang, ketoprak, dan ludruk di desanya. Harmoko pernah sekolah dalang di Surakarta, Jawa Tengah. Sampai ia dewasa, bahkan menjadi Menteri Penerangan serta Ketua Umum GOLKAR (Golongan Karya), Harmoko masih sering menyalurkan *hobby* dan bakatnya mendalang. Beberapa kali Harmoko menghibur rakyat dengan kepiawaiannya bercerita dan memainkan wayang sebagai dalang. Melalui *hobby*-nya pada kesenian itu membuat Harmoko menjadi pribadi yang terbuka dan mudah bersosialisasi, bahkan ia sering disebut sebagai pribadi yang humoris (Lopez, 1997:20; Aprilliani, 2015; dan Abdulsalam, 2017).

Selain memiliki minat dan bakat pada kesenian, Harmoko juga memiliki minat pada dunia jurnalisme. Menurut pengakuan Harmoko sendiri (2009), hal 3-5) yang menjelaskan pengalaman hidupnya, ia mempunyai ayah bernama Asmo Prawiro dan ibunya bernama

Soeriptinah. Harmoko dilahirkan di Desa Pathinrowo, Kertosono, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Februari 1939. Harmoko merupakan anak ketiga dari sepuluh orang bersaudara. Harmoko masuk ke SR (Sekolah Rakyat), sekarang SD (Sekolah Dasar), saat dirinya mulai tertarik pada kesenian, karena di sekolahnya terdapat ekstra-kurikuler, seperti karawitan, bernyanyi, dan menari, yang membuat apresiasi seni muncul dalam diri Harmoko (Harmoko, 2009:3-5; Aprilliani, 2015; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Awal karier Harmoko dan ketertarikannya pada kesenian ditunjukkan saat ia bergaul dengan para Seniman Senen di Jakarta. Harmoko bercita-cita untuk menjadi seorang wartawan. Sejak kelas 3 SR, cita-cita itu tumbuh karena ayahnya selalu memfasilitasi Harmoko agar gemar membaca dengan membelikan buku-buku. Minat dan bakat Harmoko, dengan demikian, dipengaruhi oleh keluarga dan juga lingkungan, yang membentuk kepribadiannya (Gayatri *et al.*, 2009; Harmoko, 2009; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Cita-cita Harmoko untuk menjadi wartawan ternyata terwujud. Menurut M. Busye & Rujito (1989), dan sarjana lainnya, Harmoko merupakan tokoh jurnalistik yang merambah ke dunia politik. Ia memulai kariernya dari menjadi kolektor koran hingga masuk ke panggung politik; dan diberi status sebagai wartawan politik didalam surat kabar *Merdeka* di Jakarta. Harmoko ditetapkan menjadi korektor terbaik; dan berkat ketekunannya, ia mampu menulis cerpen, membuat karikatur, cerita bersambung, artikel, dan masalah yang memuat reportase, barulah ia kemudian naik pangkat menjadi "wartawan kota", yang mana Harmoko harus meliput berita di kota. Dalam memulai kariernya sebagai wartawan, Harmoko bekerja di surat kabar *Merdeka* di Jakarta (Busye & Rujito, 1989:61-64; Administrator,

2003; dan Terbit, 2015).

Dalam perkembangan kariernya sebagai wartawan, Harmoko membangun sebuah harian umum, yang menghususkan berita untuk lapisan masyarakat bawah, yang bernama *Pos Kota*. Menurut Fachri Ali & Kholid Novianto (1997), dan sarjana lainnya, pada tanggal 13 Maret 1983, Harmoko dipanggil oleh Presiden Soeharto ke rumahnya di Jalan Cendana, Jakarta. Didalam pertemuan itu, Presiden Soeharto meminta kesediaan dan kesanggupan Harmoko untuk memimpin Departemen Penerangan. Didalam pertemuan itu juga, Presiden Soeharto memberikan pengarahan kepada Harmoko tentang fungsi dan peranan Departemen Penerangan, yang akan menjadi tugasnya itu (Ali & Novianto, 1997:139; Raditya, 2010; dan Matanasi, 2020).

Dalam memimpin Departemen Penerangan, Harmoko merupakan orang yang mendukung gagasan “Pers Pancasila”, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut B. Djamily (1985), dan sarjana lainnya, landasan kebebasan dalam “Pers Pancasila”, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers, adalah sebagai berikut: Pancasila sebagai landasan idiilnya; UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 sebagai landasan konstitusionalnya; GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai landasan strategisnya; Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers serta segenap peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagai landasan yuridisnya; tata-nilai masyarakat yang berlaku sebagai landasan kemasyarakatannya; Kode Etik Profesi sebagai landasan etisnya; serta interaksi positif antara Pers, Pemerintah, dan Masyarakat sebagai landasan mekanismenya (Djamily, 1985:114-115; Febriyanti, 2016; dan Matanasi, 2020).

Dukungan Harmoko terhadap gagasan “Pers Pancasila” itu

menentukan arah kebijakannya sebagai Menteri Penerangan. Harmoko memiliki pandangan bahwa walaupun pers itu bebas, namun tetap harus bertanggung jawab; dan pers harus dikontrol untuk mendukung pembangunan dan stabilitas negara. Dalam memimpin Departemen Penerangan, Harmoko juga memberlakukan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) untuk mendukung gagasan “Pers Pancasila”. Menurut Taufik Abdullah (2003), dan sarjana lainnya, pada tanggal 31 Oktober 1984, Menteri Penerangan Harmoko mengeluarkan Peraturan No.1/PER/MENPEN/1984 tentang SIUPP, dimana Peraturan Menteri Penerangan ini banyak menimbulkan masalah di bidang penerbitan pers di Indonesia (Abdullah, 2003:411; Haritajaya, 2017; dan Matanasi, 2020).

Menurut Hutagalung (2013), dan sarjana lainnya, kebijakan tentang adanya SIUPP mencerminkan usaha nyata tentang pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter. Pers tidak boleh memuat berita yang bertentangan dengan program pemerintah. Intervensi kepentingan pemerintah itu membuat pers tidak mampu bersikap independen dan juga kritis, karena pemerintah terus mengontrol pers secara represif. Pemerintah mengontrol pers dengan cara pembredelan, pemberhentian pasokan kertas, hingga menghilangkan nyawa wartawan. Pers juga hanya dijadikan sebagai saluran propaganda untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan status quo pemerintah (Hutagalung, 2013:56-57; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Haritajaya, 2017).

Namun, berbeda menurut Fachri Ali & Kholid Novianto (1997), dan sarjana lainnya, bahwa Harmoko dalam menetapkan SIUPP itu ternyata didasari oleh rasa prihatin, karena

dalam pandangan Harmoko, darah-dagingnya adalah wartawan, namun jabatannya tidak bisa dilepaskan dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Harmoko mungkin dan memang telah dituduh sebagai aktor utama untuk seluruh “tragedi” dari drama pencabutan SIUPP. Tapi dalam konteks politik secara nasional, tindakan semacam itu tidaklah hanya terbatas pada seorang pejabat, melainkan telah pula berkaitan dengan elemen-elemen pemerintah lainnya secara keseluruhan. Setidaknya, kenyataan itu tercermin dalam lembaga Dewan Pers, yakni sebuah lembaga yang paling berwenang dalam memberi saran dan rekomendasi terhadap pencabutan hak hidup pers, yang melibatkan bukan saja berbagai instansi pemerintah, melainkan juga kalangan pers itu sendiri (Ali & Novianto, 1997:166-167; Haritajaya, 2017; dan Matanasi, 2020).

Mengkaji masalah penetapan SIUPP ini banyak pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro memaparkan bahwa penetapan SIUPP hanya sebagai kewajiban Harmoko dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Penerangan untuk mampu mengontrol pers agar tidak mengganggu jalannya pembangunan dan stabilitas negara. Manakala pihak yang kontra menganggap bahwa SIUPP sebagai cara pemerintah, melalui Harmoko, untuk membelenggu demokrasi dan mempertahankan kekuasaan Orde Baru (Ali & Novianto, 1997; Batubara, 2009; dan Hutagalung, 2013).

Menurut David T. Hill (2011), dan sarjana lainnya, bahwa pada kurun waktu 1980-an, banyak pers yang mengalami pembredelan, seperti yang terjadi pada bulan Mei 1984, dimana majalah *Fokus*, surat kabar *Sinar Harapan*, surat kabar *Prioritas*, dan majalah *Monitor* dibredel oleh pemerintah Orde Baru (Hill, 2011:40-43; Manan *et al.*, 2014; dan Haritajaya, 2017).

Pada tahun 1990-an, pers mengalami kebebasannya kembali dengan memberitakan berbagai berita yang awalnya tabu di mata masyarakat. Pada masa itu industri pers berkembang pesat, sementara kekuatan negara tengah terburai dan terburai. Namun masa itu, nampaknya, tidak bertahan lama, karena pada tanggal 21 Juni 1994, Menteri Penerangan Harmoko mencabut izin terbit 3 mingguan berita ternama, yaitu *Tempo*, *DeTIK*, dan *Editor*. Ketiga media itu telah memanfaatkan keterbukaan politik dan kebebasan pers dengan memberitakan bisnis keluarga Presiden, pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), penyalahgunaan kekuasaan, cacat administrasi pada anggaran pemerintahan, dan pecahnya kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh pemerintah dan tentara Indonesia (Administrator, 2003; Manan *et al.*, 2014; dan Haritajaya, 2017).

Harmoko, sebagai Menteri Penerangan, juga melakukan komunikasi politik “sambung rasa”, yakni penyampaian informasi yang dilakukan secara ringan agar mudah dimengerti atau diselingi humor. Selain itu, komunikasi dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan masyarakat, dan topik yang disampaikan harus sesuai dengan isu terkini dan kebutuhan masyarakat yang memang penting untuk disampaikan (Harmoko, 1985 dan 1992; Sitepu, 2015; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016).

Menurut Fachri Ali & Kholid Novianto (1997), dan sarjana lainnya, Harmoko berusaha membangun institusi baru di tengah masyarakat desa, yaitu KELOMPENCAPIR (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa). KELOMPENCAPIR ini merupakan lembaga baru yang hidup di desa, dengan memanfaatkan instrumen budaya tradisional, yaitu filosofi Jawa: *mangan ora mangan asal kumpul* (mau makan atau tidak makan, yang penting kumpul).

Melalui KELOMPENCAPIR, informasi masyarakat desa lebih berkembang melalui radio, televisi, dan koran (Harmoko, 1985 dan 1992; Ali & Novianto, 1997:146-150; dan Prasetyo, 2019).

Selain itu, Harmoko juga melakukan komunikasi politik melalui *Safari Ramadhan*. Menurut Azwar (2009), dan sarjana lainnya, *Safari Ramadhan* merupakan pemanfaatan kegiatan-kegiatan selama bulan *Ramadhan* untuk berkomunikasi dan “sambung rasa”, dengan mendengarkan suara hati rakyat yang kemudian dibawa pada Rapat Kabinet, sehingga persoalan bisa didengar langsung oleh Presiden (Azwar, 2009:88; Isnaeni, 2013; dan Aprilliani, 2015).

Selain memimpin Departemen Penerangan, Harmoko juga diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR (Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya). GOLKAR merupakan kendaraan politik bagi pemerintah Orde Baru, yang biasanya selalu dipimpin oleh ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Rakyat menuntut adanya demokratisasi dalam tubuh GOLKAR, yang selalu didominasi oleh ABRI. Dalam menanggapi aspirasi rakyat ini, GOLKAR terus melakukan pembaharuan dengan cara memperbanyak kalangan sipil yang mulai menjabat, baik dalam pemerintahan Orde Baru maupun dalam GOLKAR. Salah satu pembaharuan dalam tubuh GOLKAR yaitu mengangkat Harmoko sebagai tokoh sipil pertama yang memimpin GOLKAR (Abdulsalam, 2017; Prasetyo, 2019; dan Matanasi, 2020).

Menurut Firdaus Syam (2008), dan sarjana lainnya, perkembangan GOLKAR mengalami pergeseran dan dinamika dengan menguatnya sipil didalam tubuh organisasi tersebut. Pada era 1990-an, peran sipil semakin kokoh dalam perpolitikan di tubuh GOLKAR. Hal tersebut terbukti dengan terpilihnya Harmoko sebagai Ketua Umum GOLKAR, periode 1993-1999

(Syam, 2008:26; Abdulsalam, 2017; dan Prasetyo, 2019).

Sebenarnya, pemilihan Harmoko sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR telah pasti ditetapkan, bahkan sebelum diadakannya MUNAS (Musyawarah Nasional) V di Jakarta. Harmoko telah dipercaya oleh Presiden Soeharto sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR. MUNAS yang diadakan GOLKAR nampaknya hanya formalitas belaka, karena pemenang atau yang akan menjadi Ketua Umum GOLKAR sudah disiapkan oleh Ketua Dewan Pembina GOLKAR, yakni Presiden Soeharto, jauh-jauh hari. Sehingga, dalam kenyataannya, Dewan Pembina terang-terangan memilih Harmoko sebagai Ketua Umum DPP GOLKAR (Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; Abdulsalam, 2017; dan Prasetyo, 2019).

GOLKAR, yang sudah berkuasa selama 27 tahun dan berperan sebagai partai pemerintah, selalu memenangkan setiap PEMILU (Pemilihan Umum) pada masa Orde Baru, 1971-1997. Dalam perkembangannya, GOLKAR terus mendapat kritikan dan masukan agar lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Rakyat juga menuntut adanya demokratisasi dalam tubuh GOLKAR, yang selalu didominasi oleh ABRI. Dalam menanggapi aspirasi rakyat tersebut, GOLKAR terus melakukan pembaharuan dengan berbagai cara, terutama untuk memperkuat kepemimpinan sipil dalam tubuh GOLKAR pada tahun 1990-an (Liddle, 1994; Abdulsalam, 2017; dan Firdausi, 2019).

Dalam konteks ini, Riswandha Imawan (1997), dan sarjana lainnya, memaparkan bahwa MUNAS ke-V GOLKAR, pada tanggal 20-25 Oktober 1993, membahas kewajiban regenerasi politik; PJP (Pembangunan Jangka Panjang) ke-II dengan tekad merebut teknologi canggih; tahap tinggal landas untuk memberantas kemiskinan; perubahan paradigma

pembangunan dari pertumbuhan ekonomi beralih kepada penekanan pada HAM (Hak Asasi Manusia); pembangunan berwawasan lingkungan hidup; tuntutan profesionalitas ABRI yang memunculkan kebijakan *ABRI Back to Basic*; dan tuntutan elite sipil untuk dipercaya memegang jabatan di birokrasi pemerintahan di Indonesia (Imawan, 1997:167; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Abdulsalam, 2017).

Tuntutan demokrasi terus dilontarkan didalam tubuh GOLKAR, karena organisasi ini sudah dianggap tidak bisa menjadi jembatan bagi aspirasi dan kepentingan politik rakyat banyak. GOLKAR dipandang kurang responsif terhadap aspirasi rakyat, berkenaan dengan GOLKAR yang memiliki kekuatan mayoritas tunggal, tanpa kontrol dari kekuatan politik lain di Parlemen. GOLKAR juga mendominasi dalam setiap pemerintahan. Hal ini, tentu saja, menjadikan GOLKAR bisa dengan mudah mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan politik pemerintah, bukan kepentingan politik rakyat kebanyakan. ORSOSPOL (Organisasi Sosial dan Politik) lainnya tidak dapat berbuat apa-apa, karena suara minoritasnya di Parlemen dan Pemerintahan. Hal ini membuat GOLKAR bisa lepas kontrol, dan pembaharuan tersebut diterapkan pada era Harmoko sebagai Ketua Umum GOLKAR (Reeve, 2013; Abdulsalam, 2017; dan Sudrajat, 2019).

Kembali merujuk kepada pendapat Riswandha Imawan (1997), dan sarjana lainnya, bahwa sebelum diadakan MUNAS ke-V untuk memilih siapa yang akan menjadi Ketua Umum GOLKAR, terjadi *Caucus* yaitu pertemuan tidak resmi antar elite partai untuk mencapai persetujuan tentang arah gerak partai, termasuk tokoh-tokoh yang akan ditampilkan. Tujuan dari pertemuan itu untuk memberi arahan atau patokan, sehingga jalannya sidang tidak berlarut-larut.

Caucus menyebabkan tokoh pembuat keputusan bermain di belakang layar, tetapi mereka sangat mempengaruhi cerita ataupun keputusan-keputusan yang diambil didalam MUNAS tersebut (Imawan, 1997:171-172; Reeve, 2013; dan Prasetyo, 2019).

Dengan diadakannya *Caucus* ini, tentu saja, menunjukkan bahwa MUNAS yang diadakan oleh GOLKAR sebagai formalitas politik belaka untuk menunjukkan dirinya sebagai partai yang demokratis dan menjunjung tinggi gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah, serta mufakat. Melalui *Caucus* tersebut, sebenarnya, sudah diambil keputusan siapa yang selanjutnya akan memimpin GOLKAR, sehingga selama MUNAS berlangsung bisa terlihat siapa yang akan dijadikan pemimpin GOLKAR, tanpa proses dan perbedatan yang panjang. Hal ini, sebenarnya, membuat tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap GOLKAR, yang berakar dari akar rumput di bawah, tidak dapat terwujud, karena yang terjadi adalah pemimpin GOLKAR itu merupakan elite politik yang dipilih oleh elite politik lainnya (Reeve, 2013; Abdulsalam, 2017; dan Prasetyo, 2019).

Setidaknya ada tiga elite politik yang berperanan penting dalam MUNAS ke-V GOLKAR ini. Pertama adalah Dewan Pembina GOLKAR, yang merupakan pusat kekuasaan GOLKAR, yaitu Presiden Soeharto. Keputusan GOLKAR harus berdasarkan restu dan petunjuk dari Dewan Pembina. Kedua adalah Kelompok Cedekiawan, seperti Prof. Dr. B.J. (Bacharuddin Jusuf) Habibie, dimana pendapatnya sangat menentukan, karena berhubungan langsung dengan image pembaharuan dalam tubuh GOLKAR, selain posisi B.J. Habibie sendiri saat itu sebagai Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), yang selalu didukung oleh pemilih Muslim di Indonesia. Ketiga adalah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia), dimana peran penting ABRI didalam tubuh GOLKAR memang tak bisa terhindarkan lagi, dan dalam konteks ini ABRI berperan untuk menyetujui elite politik yang muncul untuk memimpin GOLKAR (Abdulsalam, 2017; Rohman, 2018; dan Rizkiansyah, 2019).

Harmoko melakukan temu kader ke berbagai daerah di Indonesia untuk menggalang kekuatan atau menciptakan kader yang sesuai dengan MUNAS GOLKAR. Temu kader ini dilakukan sebagai sarana pendidikan politik. Dalam konteks ini, M. Busye (1997); Azwar (2009); dan sarjana lainnya, memaparkan bahwa dalam pandangan Harmoko, temu kader adalah wahana untuk mengembangkan komunikasi dan pendidikan politik, serta menyampaikan gagasan dan program-program pembangunan yang mengacu kepada amanat MUNAS V GOLKAR. Harmoko memiliki prinsip-prinsip politik, yang selalu disampaikan dalam temu kader tersebut. Setiap kader GOLKAR, menurut Harmoko, harus memenuhi PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela). "Tidak Tercela" bisa berarti juga tidak menyakiti hati rakyat, tidak korupsi, dan tidak menyalahgunakan wewenang (Harmoko, 1985 dan 1992; Busye, 1997:158; Azwar, 2009:86; Abdulsalam, 2017; dan Prasetyo, 2019).

Temu kader ternyata banyak menuai pro-kontra dengan adanya tuduhan bahwa temu kader merupakan kampanye terselubung, karena secara tidak langsung dalam temu kader tersebut, Harmoko memperkenalkan visi-misi GOLKAR atau keinginan politiknya. Namun, Harmoko menjawab bahwa temu kader bukan kampanye terselubung, karena bersifat terbuka dan untuk melaksanakan amanat MUNAS ke-V GOLKAR. Menurut A. Lopez (1997), dan sarjana lainnya, Harmoko dengan mudah menjawab tuduhan yang menyebutkan temu

kader merupakan kampanye terselubung. Dalam pandangan Harmoko, temu kader yang dilakukan bukan kampanye, karena kampanye baru akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Panitia PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia (Harmoko, 1985 dan 1992; Lopez, 1997:58; Isnaeni, 2013; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; Abdulsalam, 2017; dan Prasetyo, 2019).

Melalui temu kader, yang dilakukan oleh Harmoko, membuat GOLKAR memenangkan PEMILU 1997. Temu kader tersebut menciptakan image yang membuat Harmoko dekat dengan rakyat dan mampu menanggapi aspirasi rakyat. Selain melakukan temu kader, Harmoko juga melakukan studi pemilihan dalam survey dan kajian masalah aktual saat itu. Hal itu dilakukan untuk membuat GOLKAR lebih responsif dan mengetahui bagaimana sebenarnya respon masyarakat kepada GOLKAR: apakah masih mendukung atau tidak. GOLKAR juga menelaah kekurangan dan kelebihan lawannya, serta prediksi perolehan suara GOLKAR dalam PEMILU di Indonesia (Harmoko, 1992; Isnaeni, 2013; Reeve, 2013; dan Firdausi, 2019).

Menurut Syamsuddin Haris (1998), dan sarjana lainnya, hasil sementara perhitungan suara dalam PEMILU 1997 memperlihatkan kembali "keunggulan" GOLKAR dibandingkan dengan OPP (Organisasi Peserta PEMILU) yang lain, yaitu dengan meraih 74.3 persen suara. PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yang sempat "menghijaukan" pulau Jawa, memperoleh 22.7 persen suara; sementara PDI (Partai Demokrasi Indonesia) versi Soerjadi hanya kebagian 3.0 persen suara. Bagi GOLKAR, peningkatan suara sekitar 6.2 persen dibanding dengan hasil PEMILU 1992 itu adalah "kemenangan besar" yang melampaui target 70.02 persen suara (Liddle, 1994; Haris,

1998:172; dan Reeve, 2013).

Pada perkembangan selanjutnya, mendekati pemilihan Presiden untuk periode 1998-2003, Harmoko, sebagai Ketua Umum GOLKAR, tentu mempunyai wewenang untuk menentukan siapa calon Presiden dari partai GOLKAR selanjutnya. Harmoko, kemudian, mencalonkan kembali Soeharto sebagai Presiden RI (Republik Indonesia) yang ketujuh kalinya selama pemerintahan Orde Baru di Indonesia (Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; Abdulsalam, 2017; dan Prasetyo, 2019).

Menurut Firdaus Syam (2008), dan sarjana lainnya, sebelum Soeharto menjabat sebagai Presiden yang ketujuh kalinya, ia meminta kepada Harmoko, selaku Ketua Umum GOLKAR, untuk meneliti kembali mengenai apakah dirinya (Soeharto) didukung dan diminta oleh rakyat secara keseluruhan? Perlu diketahui bahwa dalam PEMILU 1997, Presiden Soeharto telah mengatakan di hadapan Pimpinan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di Jakarta agar tidak dipilih kembali sebagai Presiden, karena ia sudah TOP (Tua, Ompong, dan Peot). Namun, Harmoko menerjemahkan perkataan itu bahwa Soeharto masih ingin menjadi Presiden; dan untuk tidak mengecewakan Soeharto, akhirnya Harmoko memilih mencalonkan kembali Soeharto sebagai Presiden dari GOLKAR (Syam, 2008:33; Abdulsalam, 2017; dan Matanasi, 2020).

Perkembangan karier politik Harmoko terus berlanjut. Presiden Soeharto kemudian mengangkat Harmoko menjadi Ketua MPR/DPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Menurut Syamsuddin Haris (1998), dan sarjana lainnya, terjadi suatu hal yang menarik dalam pergantian elite politik di Indonesia. Seperti MENPEN (Menteri Penerangan) Harmoko, yang juga Ketua Umum DPP GOLKAR, digeser pada saat pemerintahan yang belum

usai merayakan pesta demokrasi atas kemenangan GOLKAR dalam PEMILU 1997 sebesar 74.3% suara, malah diangkat menjadi Ketua MPR/DPR pada saat itu juga (Haris, 1998:177; Sekjen DPR RI, 1999; dan Matanasi, 2020).

Sementara itu, menurut Taufik Abdullah (2003), dan sarjana lainnya, rakyat menuntut dilakukan Reformasi Total pada tahun 1998, selain dalam bidang ekonomi, juga terutama dalam bidang politik dan hukum. Logikanya, krisis ekonomi Indonesia bukan hanya disebabkan merosotnya nilai Rupiah, tetapi juga oleh tatanan politik yang tidak demokratis dan hukum yang terlampau diabdikan kepada kekuasaan pemerintah yang otoriter, sehingga tidak mendatangkan keadilan yang sebenarnya. Pada saat Harmoko menjabat sebagai Ketua DPR/MPR, ia dihadapkan pada masalah serius, yakni terjadi kerusuhan dimana-mana untuk menuntut dilaksanakannya gerakan Reformasi. Dalam menanggapi hal ini, Harmoko memaparkan bahwa gerakan Reformasi harus berjalan secara gradual (Sekjen DPR RI, 1999; Abdullah, 2003:57; dan Prasetyo, 2019).

Di Indonesia, pada tahun 1997-1998, memang sedang terjadi krisis multi-dimensional, seperti kerusuhan politik, krisis keuangan dan perbankan, krisis sosial, dan krisis lainnya. Menurut Firdaus Syam (2008), dan sarjana lainnya, sistem keuangan dan ekonomi Indonesia begitu lemah; banyak bank berdiri dengan modal yang lemah; kemudahan kredit melebihi *platform* dengan fokus pengelolaan dana kepada anggota grupnya; pinjaman swasta nasional di luar negara sangat banyak yang diberikan pada usaha jangka pendek; ekspor lebih kecil dibanding impor; monopoli dan subsidi untuk usaha yang dekat dengan pengusaha; nilai Rupiah semakin melemah; cadangan devisa negara semakin menipis; hutang semakin membengkak; daya beli masyarakat rendah; serta perdagangan

valuta asing dengan cara spekulatif (cf Syam, 2008:35-38; Harahap, 2013; dan Tangkilisan, 2015).

Selain itu, pada tahun 1997, menurut Bank Dunia, sekitar 20-30 persen dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal baik bagi Presiden Soeharto, ketika pemerintah Orde Baru dipaksa meminjam dana dari IMF atau *International Monetary Fund* (Blustein, 2001; Salamah, 2001; and Harahap, 2013).

Dari keadaan Indonesia yang sangat buruk, mengenai ketidak-stabilan ekonomi, terus berdampak pada kehidupan sosial dan masyarakat. Kemiskinan semakin terasa, saat masyarakat tidak bisa membeli bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, karena harga-harga yang melambung tinggi. Selain itu, kerusuhan bernaung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) pun terjadi. Dalam masa yang sama, terjadi kebakaran hutan di Kalimantan dan Sulawesi, yang menyebabkan gangguan kesehatan. Krisis-krisis itu berdampak kepada ketidak-stabilan politik di Indonesia; kekacauan terjadi dimana-mana, karena penguasa dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Ditambah lagi, masyarakat sudah tidak menginginkan kepemimpinan Presiden Soeharto (Perkasa, 2015; Aswicahyono & Christian, 2017; dan Renhoard, 2019).

Kembali, menurut Firdaus Syam (2008), dan sarjana lainnya, dalam menanggapi krisis-krisis tersebut, pemerintah Orde Baru menggunakan metode CBS (*Currency Board System*). Dalam pertemuannya di kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta, ketika itu Presiden menyerahkan berkas metode CBS kepada pimpinan Dewan yang hadir untuk dipelajari. Para pemimpin Dewan kemudian mempelajari dan melakukan tukar

pikiran tentang penggunaan metode CBS tersebut. Metode tersebut dipilih, juga didukung oleh Harmoko selaku Ketua MPR/DPR untuk mengatasi krisis moneter di Indonesia (Kusaeni, 2008; Syam, 2008:42-43; dan Rusliani, 2018).

Harmoko kemudian menjelaskan bahwa devisa negara sangat terbatas, yakni hanya tinggal 13 milyar Dollar AS (Amerika Serikat). Dengan penerapan metode CBS, disertai dukungan nyata, diharapkan negara memiliki dana yang segera dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Konsekuensi dari pemberlakuan CBS, menurut Harmoko, akan membawa perubahan terhadap UU (Undang-Undang) Bank Sentral. Sehubungan dengan itu, pemerintah Orde Baru merencanakan mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), yakni UU Nomor 13 Tahun 1986 mengenai Bank Sentral, sebelum Sidang Umum MPR, dan DPR pun menyetujui model CBS ini (Rajab, 2004; Harmoko, 2009; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; Suhendra, 2017; dan Rusliani, 2018).

Dalam menyelesaikan konflik politik yang terjadi pada masa Orde Baru, tentu saja, Harmoko memiliki kedudukan dan peranan sebagai Ketua MPR/DPR, yang berhak mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Harmoko menyetujui metode CBS, yang datang dari usulan Presiden Soeharto, saat rapat di Jalan Cendana, Jakarta. Penggunaan metode CBS diyakini oleh Harmoko dapat memberikan perubahan yang baik untuk krisis multi-dimensional yang terjadi di Indonesia. Walaupun ada konsekuensinya, yaitu akan terjadi perubahan UU Bank Sentral (Rajab, 2004; Kusaeni, 2008; Harmoko, 2009; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Adinaya, 2018).

Dalam memutuskan kebijakan yang harus dipilih oleh pemerintah Orde Baru, terlihat bahwa Presiden

Soeharto memang sudah mulai kehilangan kekuatannya. Terbukti dari awalnya, ia mengusulkan metode CBS untuk mengatasi krisis, namun berubah tanpa persetujuan DPR/MPR menjadi meminta bantuan IMF. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Harmoko, sebagai Ketua MPR/DPR dan sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat, tidak dapat mengambil sikap politik berdasarkan keputusan awal yang disetujui oleh DPR/MPR; malah membiarkan keputusan Presiden Soeharto untuk bekerjasama dengan IMF. Walaupun dalam pernyataan di atas, Harmoko merasa kecewa, tapi sepertinya tidak ada perlawanan khusus untuk menghentikan keputusan Presiden Soeharto tersebut (Blustein, 2001; Abdullah, 2003; Harmoko, 2009; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Suhendra, 2017).

Suasana memprihatinkan yang terjadi itu tidak direspon dengan baik oleh pemerintah Orde Baru, malah memutuskan untuk meminta bantuan kepada IMF. Hal ini membuat kecewa rakyat, karena uluran tangan IMF sama sekali tidak membantu dan semakin membuat Indonesia terpuruk. Upaya pemerintah ini membuat rakyat bereaksi secara luas, mulai dari menyampaikan rasa keprihatinan, himbauan, sampai pada tuntutan perlunya Reformasi di Indonesia. Dalam konteks ini, tuntutan Reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, karena khawatir dengan nasib rakyat kecil di seluruh wilayah Indonesia (Blustein, 2001; Rajab, 2004; dan Suhendra, 2017).

Dukungan terhadap nasib rakyat kecil dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai daerah, seperti di Jakarta, mahasiswa UI (Universitas Indonesia) berhasil menerobos masuk kedalam Sidang Umum MPR untuk mendengar pertanggungjawaban Presiden Soeharto, merumuskan GBHN (Garis-

garis Besar Haluan Negara), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Di kampus UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta digelar aksi keprihatinan, yang melibatkan belasan ribu mahasiswa dan dosen untuk menuntut ketersediaan bahan pokok, mempersoalkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta pertanggungjawaban Presiden Soeharto di hadapan MPR (Baehaqi ed., 1998; Suwirta, 2007; dan Saputra, 2012).

Suasana terus memanas dan masyarakat menuntut pemerintah Orde Baru untuk melakukan Reformasi. Pada saat itu, Soeharto telah ditetapkan kembali menjadi Presiden yang ke-7 kalinya, melalui SU (Sidang Umum) MPR, dan nampaknya masyarakat memang sudah tidak mengharapkan lagi hal tersebut. Nampaknya, usia kepemimpinan Presiden Soeharto memang harus berakhir pada tahun 1998. Seolah mendapat firasat akan lengsernya Soeharto dari jabatan ke-Presiden-an, saat Soeharto ditetapkan sebagai Presiden lagi dalam Sidang Paripurna ke-V tanggal 11 Maret 1998, palu yang dipakai oleh Harmoko untuk menutup dan mensyahkan keputusan dalam sidang itu pun patah, tidak seperti biasanya. Pimpinan Sidang, yaitu Harmoko, yang didampingi para Wakilnya dan seluruh anggota MPR periode 1998-2003, menutup persidangan dengan mengetukkan palu sidang sebanyak 3 kali (Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; Adinaya, 2018; dan Rizal, 2020).

Menurut Firdaus Syam (2008), dan sarjana lainnya, Harmoko mengemukakan bahwa begitu Palu Sidang itu ia ketukan, seperti biasanya tidak terjadi apa-apa, namun kali ini yang terjadi lain. Palu itu ketika diketukkan *meleset* (keluar dari sasaran), bagian kepalanya patah, kemudian terlempar kedepan, di hadapan jajaran anggota-anggota

MPR yang terhormat. Pada waktu itu, persis di jajaran terdepan, duduk para anggota MPR yang lain, diantaranya adalah Mbak Tutut atau Siti Hardiyanti Rukmana (putri sulung Presiden Soeharto) dan Ginandjar Kartasasmita, yang behadapan dengan kursi Pimpinan Dewan. Palu itu kemudian diamankan oleh petugas Pengawal Presiden (Syam, 2008:16; Harmoko, 2009; dan Adinaya, 2018).

Dengan keputusan terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, ternyata, membuat rakyat kecewa; dan akhirnya mereka berharap agar Presiden Soeharto bersedia untuk *lengser* (mengundurkan diri), karena rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Orde Baru. Para mahasiswa juga terus melakukan aksi unuk menuntut Reformasi sejak saat SU MPR dimulai, bahkan para mahasiswa itu menuntut agar diberi kesempatan untuk ikut dalam SU MPR dan menyalurkan aspirasi serta berdialog langsung dengan MPR. Tuntutan mahasiswa adalah menyelesaikan seluruh krisis nasional dengan cepat, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Baehaqi ed., 1998; Suwirta, 2007; dan Saputra, 2012).

Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, tahun 1998, bangsa Indonesia dihadapkan pada krisis multi-dimensional, seperti kelaparan, kemiskinan, inflasi tinggi, dan harga-harga melonjak. Tuntutan gerakan Reformasi, yang utama, adalah karena pemerintah Orde Baru dinilai tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Mahasiswa banyak yang melakukan unjuk rasa di mana-mana. Namun, akibat demonstrasi para mahasiswa tersebut, terjadi penembakan-penembakan terhadap mahasiswa UNSAKTI (Universitas Trisakti) di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1998, sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia ikut

berduka dan marah. Akibatnya, “Tragedi Trisakti” ini diikuti dengan peristiwa anarkis di Ibukota Jakarta dan di beberapa kota lainnya. Semua peristiwa tersebut makin meyakinkan mahasiswa untuk menguatkan tuntutan pengunduran diri Soeharto dari kursi ke-Presiden-an. Pilihan aksi yang kemudian dipilih oleh kebanyakan kelompok massa mahasiswa untuk mendorong turunnya Presiden Soeharto mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR/MPR RI di Jakarta (Baehaqi ed., 1998; Suwirta, 2007; dan Wijiasih, 2018).

Kemarahan masyarakat Indonesia juga semakin melebar dan membara. Kini, dukungan keprihatinan muncul dari berbagai pihak, seperti dari tokoh M. Amien Rais, W.S. Rendra, Emil Salim, Ali Sadikin, Megawati Soekarnoputri, termasuk kelompok yang dahulu pernah menjabat didalam pemerintah Orde Baru, seperti para ekonom *Mafia Berkeley*, yang merupakan arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru, yang juga menghendaki Presiden Soeharto turun, karena gagal mengatasi krisis ekonomi. Selain para ekonom, pihak militer dan organisasi-organisasi sosial seperti KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), ICMi (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), dan KOSGORO (Koperasi Swakarya Gotong-Royong) juga menghendaki Presiden Soeharto turun (*cf* Suparno, 2012; Mohamad, 2015; dan Febriyanti, 2016).

Selain itu, M. Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri juga mendukung gerakan Reformasi. Di sini, pihak militer berusaha untuk tidak terlalu mendukung Presiden Soeharto, karena tidak ingin adanya bentrokan yang lebih besar antara mahasiswa dan pihak berwajib. Tuntutan dan tekanan terus dilakukan, terutama oleh para mahasiswa, untuk terlaksananya gerakan Reformasi. Tekanan tersebut

adalah tuntutan Reformasi Total, pengunduran diri Presiden Soeharto, dan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Dibawah tekanan yang semakin kuat, Pimpinan MPR/DPR, dengan didampingi oleh para Wakil Ketua dan seluruh Fraksi di Parlemen meminta agar Presiden Soeharto bersedia untuk mengundurkan diri (Yuwanto, 2016; Tanjung, 2018; dan Rizal, 2020).

Para mahasiswa berunjuk rasa dengan melakukan pendudukan terhadap Gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Peristiwa tersebut sangat monumental dan menandai proses *lengser*-nya Soeharto dari tampuk kekuasaan sebagai Presiden dan menggempanya tuntutan Reformasi. Dalam peristiwa itu, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki Gedung DPR/MPR RI untuk mendesak Presiden Soeharto mundur. Dalam hal ini, rakyat juga meminta kepada Pimpinan DPR/MPR untuk melakukan Sidang Khusus. Maka, Harmoko sebagai Ketua DPR/MPR RI memberikan keterangan dalam jumpa pers, dengan membuat pernyataan untuk meminta Presiden Soeharto mundur. Menurut A.M. Makka (2008), dan sarjana lainnya, Harmoko menanggapi situasi seperti tersebut di atas, karena Pimpinan Dewan, baik Ketua MPR/DPR maupun Wakil-wakil Ketua MPR/DPR, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri (Baehaqi ed., 1998; Suwirta, 2007; Makka, 2008:26; Yuwanto, 2016; dan Rizal, 2020).

Harmoko, pada saat itu, menyatakan persetujuannya terhadap gerakan Reformasi dan perlunya Presiden Soeharto *lengser*. Hal ini sungguh sangat menarik, karena Harmoko – semua orang tahu – merupakan orang yang sangat dekat dan selama ini mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto.

Namun, dengan pernyataannya itu, Harmoko seolah-olah sudah tidak mendukung lagi Presiden Soeharto; dan menyetujui tuntutan gerakan Reformasi, dengan meminta Presiden Soeharto untuk *lengser*, demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Harmoko, sebagai Ketua MPR/DPR, dengan demikian telah berusaha menyalurkan aspirasi masyarakat, yakni dengan meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri (Suparno, 2012; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Rizal, 2020).

Akibat keputusan itu, Harmoko kemudian menuai pro dan kontra. Di satu sisi, Harmoko merupakan orang kepercayaan Presiden Soeharto dan orang yang diangkat dalam segala posisi oleh pemerintah Orde Baru tersebut; tapi di sisi lain, Harmoko – sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di MPR/DPR – harus menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Harmoko mengambil jalan untuk menuruti “aspirasi rakyat Indonesia” dan “meminta Soeharto supaya turun dari jabatannya sebagai Presiden”. Tindakan tersebut menimbulkan banyak cibiran, dengan menyebut Harmoko tidak hanya diplesetkan namanya menjadi “Hari-hari Omong Kosong”, tetapi juga dianggap sebagai “Brutus”, yakni sosok pengkhianat dalam sebuah cerita terbunuhnya penguasa Romawi. Penguasa tersebut mati, karena pengkhianatan dari orang yang sangat dipercayainya. Di luar konteks cerita itu, Harmoko telah memberi pengaruh besar pada saat keputusannya untuk meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden, sehingga pemerintahan Orde Baru pun runtuh pada bulan Mei 1998 dan gerakan Reformasi di Indonesia pun mulai dikumandangkan hingga sekarang (Fadillah, 2013; Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016; dan Rizal, 2020).

KESIMPULAN ¹

Harmoko merupakan orang kepercayaan Presiden Soeharto. Dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto sering memberi petunjuk dan arahan kepada Harmoko. Harmoko, yang merupakan orang dari keluarga sederhana, sejak kecil ternyata memiliki perhatian pada seni dan pengetahuan. Dalam konteks ini, keluarga Harmoko sangat berperan dalam mencetak kepribadiannya.

Harmoko tumbuh menjadi pribadi yang populer, karena ia mempunyai ciri khas dalam berkomunikasi. Harmoko merupakan orang yang rajin membaca dan hal itu terjadi karena ayah Harmoko memfasilitasinya dengan membelikan buku-buku. Harmoko tumbuh menjadi anak yang tertarik dengan keadaan sosial dengan filosofi yang dimilikinya, yaitu *cheto welo-welo*. Ketertarikannya tersebut membuat Harmoko ingin terjun langsung melihat pluralitas yang ada pada masyarakat dengan menjadi wartawan. Dari profesi inilah, karier Harmoko terus berkembang.

Karier Harmoko terus naik, saat ia menjadi wartawan sampai ia menjadi pemilik sebuah media yang memiliki oplah terbesar pada masa Orde Baru

yaitu surat kabar *Pos Kota* di Jakarta. Dan sepertinya keberhasilan Harmoko dalam mengelola *Pos Kota* itu menarik perhatian Presiden Soeharto, karena saat itu Harmoko mempunyai image yang dekat dengan rakyat, mengingat *Pos Kota* diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah, sebagai bacaan yang ringan dan mudah dimengerti.

Dengan melihat keadaan ini, nampaknya Presiden Soeharto memiliki rencana lain, yakni untuk menciptakan image sebagai pemimpin baru yang demokratis; dan hal itu telah direncanakan untuk menjadikan Harmoko sebagai salah seorang Menteri dalam Kabinet Orde Baru. Mengapa dikatakan demikian, karena hanya dengan perkenalan singkat, Harmoko bisa langsung ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1983.

Saat menjadi Menteri Penerangan, Harmoko menciptakan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), yang menjadi belenggu bagi pers Indonesia dan menyebabkan terjadinya pemberedelan pers dimana-mana. Dalam pandangan Harmoko, tindakan itu adalah tugas dari pekerjaannya sebagai Menteri Penerangan. Dengan kebijakan-kebijakannya itu, Harmoko melakukan tindakan yang tidak pro kepada wartawan. Bahkan Harmoko bisa dianggap telah mengkhianati jiwa kewartawannya.

Hal lain yang dilakukan oleh Harmoko, saat menjadi Menteri Penerangan, adalah melakukan komunikasi politik “sambung rasa”, yaitu menciptakan KELOMPENCAPIR (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa); IDT (INPRES [Instruksi Presiden] Desa Tertinggal); dan KMD (Koran Masuk Desa). Nampaknya, Harmoko benar-benar dapat menarik hati Presiden Soeharto, saat ia menjabat menjadi Menteri Penerangan selama tiga periode berturut-turut, yakni dari 1983-1988, 1988-1993, dan

¹**Sebuah Pengakuan:** Artikel ini – sebelum diedit ulang dan dikemas-kini dalam bentuknya sekarang – pernah diterbitkan, dengan judul yang berbeda, yakni Gina Siti Rahmah, Andi Suwarta & Moch Eryk Kamsori. (2016). “Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)” dalam *FACTUM*, Vol.5, No.2 [Oktober], hlm.201-219. Tersedia secara online juga di: http://jurnal.upi.edu/file/GINA_SITI_RAHEMAH_S_MEK.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2019]. Kami mengucapkan terima kasih kepada Redaksi Jurnal *FACTUM*, yang telah mengizinkan artikel ini untuk diterbitkan ulang, dengan beberapa penyempurnaan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Redaksi Jurnal *SUSURGALUR*, yang telah mengedit-ulang dan mengemas-kini artikel ini, khususnya dalam memperkaya Daftar Pustaka atau Referensi. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini, jelas sepenuhnya merupakan tanggung jawab akademik kami bertiga, selaku Penulis, dan tidak ada kena-mengena dengan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada kami bertiga, selaku Penulis.

1993-1998. Walaupun begitu, lawan-lawan politik Harmoko, termasuk kalangan pers dan mahasiswa yang tidak senang dengan kiprah politiknya, sering mengejek HARMOKO dengan singkatan: "Hari-hari Omong Kosong".

Harmoko juga diangkat oleh Presiden Soeharto sendiri sebagai Ketua Umum GOLKAR (Golongan Karya). Soeharto memilih Harmoko, karena ia berasal dari kalangan sipil, saat itu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memang sudah tidak dipercaya oleh Presiden Soeharto; dan masyarakat menuntut pembaharuan politik didalam tubuh GOLKAR. Harmoko, sebenarnya, dipilih menjadi Ketua Umum GOLKAR melalui cara yang tidak demokratis, karena Harmoko dipilih di belakang layar melalui *Caucus*. Bahkan Presiden Soeharto terang-terangan menunjuk Harmoko dalam MUNAS (Musyawarah Nasional) GOLKAR untuk menegaskan keinginannya dan menjadikan Harmoko sebagai Ketua Umum GOLKAR.

Presiden Soeharto tentu memiliki rencana dengan dipilihnya Harmoko sebagai Ketua Umum GOLKAR. Presiden Soeharto sadar betul bahwa Harmoko, sebagai Ketua Umum GOLKAR, berpotensi untuk memenangkan PEMILU (Pemilihan Umum) pada tahun 1997, karena kepiawaian Harmoko dalam melakukan komunikasi politik. Harmoko melakukan komunikasi politik yang mengarah pada lapisan bawah; dan Harmoko berhasil menarik hati rakyat dengan memenangkan PEMILU pada tahun 1997 sebesar 74.3% suara untuk GOLKAR. Hal ini membuat GOLKAR berhak mengajukan siapa Presiden selanjutnya. Dan ternyata terjawab sudah bahwa Soeharto memilih Harmoko adalah untuk tujuan tersebut; dan, karenanya, Harmoko pun memilih mencalonkan kembali Soeharto dari GOLKAR untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kalinya, pada tahun 1998.

Tak sampai di situ, permainan politik masih terus berlanjut, ketika Presiden Soeharto tiba-tiba memberhentikan Harmoko dari jabatan sebagai Ketua Umum GOLKAR dan mengangkatnya menjadi Ketua MPR/DPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini jelas bahwa Presiden Soeharto benar-benar ingin melanggengkan kekuasaannya lewat Harmoko, karena MPR/DPR merupakan badan tertinggi negara yang bisa mengancam legistimasi Presiden. Jika orang yang ditempatkan didalam MPR/DPR adalah bukan orang yang pro kepada Presiden, maka Presiden bisa diberhentikan oleh MPR/DPR, sebagaimana dialami oleh Presiden Soekarno pada tahun 1967-1968.

Pada saat Harmoko memimpin MPR/DPR, nampaknya masyarakat mulai sadar betul bahwa rezim Orde Baru, 1966-1998, harus dihancurkan. Tuntutan Reformasi yang anti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) terus dikumandangkan, namun Harmoko hanya diam saja, tidak mampu mengikuti aspirasi masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, karena Harmoko tertekan, maka ia kemudian memberi keputusan untuk mengkhianati Soeharto dengan menyuruhnya turun dari jabatan sebagai Presiden RI (Republik Indonesia) pada bulan Mei 1998.

Dari segala keadaan yang ada terlihat sekali bahwa Harmoko sebenarnya memiliki kepribadian loyalist dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, bertanggung jawab, penuh pengabdian, dan jujur kepada Presiden Soeharto sebagai pemimpinnya. Walaupun demikian, perlu diingat juga, bahwa pribadi loyalist itu memiliki orientasi pada keamanan dirinya sendiri. Pribadi loyalist bisa berubah menjadi penentang, karena yang ia utamakan adalah keamanan diri sendiri. Itulah permainan dan kepentingan dalam bidang politik di

manapun dan kapan pun.

Oleh karena itu, Harmoko, dalam perkembangannya kemudian, melakukan perlawanan atau mengkhianati Soeharto, dengan ikut me-*lengser*-kannya sebagai Presiden pada bulan Mei 1998, karena tuntutan masyarakat dalam gerakan Reformasi di Indonesia. Maka bila dilihat dari penjelasan di atas, Harmoko memiliki pribadi yang mudah bersosialisasi, ahli dalam berkomunikasi, dan fleksibel dalam permainan politik praktis.²

Referensi

- Abdullah, Taufik. (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Abdulsalam, Husein. (2017). "Harmoko, Orang Sipil Pertama yang Jadi Ketua Umum Golkar" dalam *TIRTO.ID*, pada 16 Desember. Tersedia secara online juga di: <https://tirto.id/harmoko-orang-sipil-pertama-yang-jadi-ketua-umum-golkar-cBPq> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2019].
- Adinaya, G.B. (2018). "Patahnya Palu Sidang dan Firasat Harmoko mengenai Kejatuhan Soeharto" dalam *National Geographic Indonesia*, pada 21 Mei. Tersedia secara online juga di: <https://nationalgeographic.grid.id/read/13706428/patahnya-palu-sidang-dan-firasat-harmoko-mengenai-kejatuhan-soeharto> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Oktober 2019].
- Administrator. (2003). "Harmoko" dalam majalah *TEMPO*. Jakarta: 12 Januari. Tersedia secara online juga di: <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/84130/harmoko> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2019].
- Ali, Fachri & Kholid Novianto. (1997). *Politik Komunikasi Harmoko: Dari Rakyat ke Panggung Politik*. Jakarta: Intermassa.
- Aprilliani, Fitria. (2015). "Evidensi Monumen Harmoko" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*, pada 24 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/fitriapril/5518b108a333117607b665a4/evidensi-monumen-harmoko> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2019].
- Aswicahyono, Haryo & David Christian. (2017). "Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia, 1997-2016" dalam *Economics Working Paper*, No.02. Tersedia secara online juga di: https://www.csis.or.id/uploaded_file/publications/perjalanan_reformasi_ekonomi_indonesia_1997-2016.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Oktober 2019].
- Azwar. (2009). *Politik Komunikasi GOLKAR di Tiga Era*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Bachhaqi, Imam [ed]. (1998). *Soeharto Lengser: Perspektif Luar Negeri*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, Terjemahan.
- Batubara, Sabam Leo. (2009). *Indonesia Bergulat dalam Paradoks*. Jakarta: Dewan Pers. Tersedia secara online juga di: <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/256-200> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2019].
- Blustein, Paul. (2001). *The Chastening: Inside the Crisis that Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF*. USA [United States of America]: Public Affairs.
- Busye, M. (1997). *GOLKAR dan Harmoko: Man of the Year*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Busye, M. & Rujito. (1989). *50 Tahun Harmoko, Menatap dengan Mata dan Hati Rakyat: Sebuah Biografi Sepintas Kilas*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Creswell, J.W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. London and New York: Sage Publications.
- Djamily, B. (1985). *Harmoko: Menteri Penerangan Republik Indonesia, Anak Rakyat Insan yang Arif*. Kuala Lumpur: Pustaka Budiman.
- Fadillah, Ramadhian. (2013). "Kisah Brutus dan Harmoko: Penyanjung yang Jatuhkan Soeharto" dalam *MERDEKA.COM*, pada 18 Mei. Tersedia secara online juga di: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-brutus-dan-harmoko-penyanjung-yang-jatuhkan-soeharto.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 28 Oktober 2019].
- Febriyanti, Devi. (2016). "Signifikansi Surat Kabar Kompas dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 98" dalam *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol.4, No.3 [Oktober], hlm.1156-1170. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/download/pdf/230695953.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2019].

- Firdausi, F.A. (2019). "Sejarah Pemilu 1997: Usaha Gagal Melanggengkan Kuasa Soeharto" dalam *TIRTO.ID*, pada 24 April. Tersedia secara online juga di: <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1997-usaha-gagal-melanggengkan-kuasa-soeharto-dmZE> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2020].
- Gayatri, Sri Indera *et al.* (2009). "Harmoko" dalam Kasiyanto [ed]. *Sejarah Pemikiran Indonesia, Tahun 1967-1998*. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm.166-171.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia] Press, terjemahan Nugroho Notosusanto.
- Harahap, Siti Romida. (2013). "Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia: Identifikasi Periode Krisis, Tahun 1995-2011" dalam *EDAJ: Economics Development Analysis Journal*, Volume 2(4), hlm.138-328.
- Haris, Syamsuddin. (1998). *Menggugat Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Grafiti Pers.
- Haritajaya, O.B. (2017). "Pembredelan Pers di Masa Orde Baru, 1966-1998". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS [Ilmu Pengetahuan Sosial], FKIP USD [Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma]. Tersedia secara online juga di: http://repository.usd.ac.id/9908/2/121314020_full.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2019].
- Harmoko. (1985). *Komunikasi Sambung Rasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harmoko. (1992). *Information Strategi in the Era of Globalization*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI [Republik Indonesia].
- Harmoko. (2009). *Nasihat Harmoko untuk Anak-anak dan Cucu-cucu*. Jakarta: Yayasan Karya Pena Indonesia.
- Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Terjemahan.
- Hutagalung. (2013). "Dinamika Sistem Pers di Indonesia". Tersedia secara online di: www.ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/download/6588/5421 [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 20 Mei 2019].
- Imawan, Riswandha. (1997). *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, Agus Maladi. (2014). *Media dan Kekuasaan: Antropologi Membaca Dunia Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Gigih Pustaka Mandiri. Tersedia secara online juga di: http://eprints.undip.ac.id/42967/1/Buku_media_dan_kekuasaan.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2019].
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Isnaeni, Hendri F. (2013). "Aneka (Tak) Ria Safari: PKS Punya Safari Sakwah, GOLKAR Punya Safari Ramadan" dalam *HISTORIA: Masa Lampau Selalu Aktual*, pada 22 Mei. Tersedia secara online juga di: <https://historia.id/politik/articles/aneka-tak-ria-safari-vxxxv/page/1> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2019].
- Kartodirdjo, Sartono. (2018). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, edisi revisi.
- Kuntowijoyo. (2008). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusaeni, Akhmad. (2008). "Steve Hanke Mengenang Jatuhnya Rupiah dan Soeharto" dalam *ANTARANEWS.COM*, pada 27 Maret. Tersedia secara online juga di: <https://www.antaraneews.com/berita/97705/steve-hanke-mengenang-jatuhnya-rupiah-dan-soeharto> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2019].
- Liddle, R. William. (1994). *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang-Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Lopez, A. (1997). *Bung Harmoko Membawa Misi Wong Cilik*. Jakarta: Yayasan Karya Pena Indonesia.
- Makka, A.M. (2008). *Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Manan, Abdul *et al.* (2014). *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Penerbit AJI [Aliansi Jurnalis Independen]. Tersedia secara online juga di: <https://medan.aji.or.id/wp-content/uploads/2016/06/SEMANGAT-SIRNAGALIH.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2019].
- Matanasi, Petrik. (2020). "Agar Namanya 'Harum', Soeharto juga Punya Barisan Buzzer" dalam *TIRTO.ID*, pada 20 Maret. Tersedia secara online juga di: <https://tirto.id/agar-namanya-harum-soeharto-juga-punya-barisan-buzzer-eGev> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 20 Mei 2020].
- Mohamad, Goenawan. (2015). *Detik-detik Paling Menengangkan: Rangkaian Peristiwa Mencekam Menjelang Kejatuhan Soekarno dan Soeharto*. Yogyakarta: Penerbit Palapa.
- Nasution, Khoiruddin. (2017). "Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam" dalam *AL-AHWAL*, Vol.10, No.1 [Juni], hlm.13-22.
- Nugraha, Pepih. (2015). "Catatan tentang Harmoko (5): 'Common Enemy' tapi Sumber Inspirasi" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*, pada 26 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/pepihnugraha/54fd2992a33311111d50faa4/catatan-tentang-harmoko-5-common-enemy-tapi-sumber-inspirasi> [diakses di Bandung,

- Jawa Barat, Indonesia: 5 Oktober 2019].
Perkasa, Surya. (2015). "Dari Konflik Ambon hingga Pengusiran Ahmadiyah" dalam *MEDCOM.ID*, pada 28 Desember. Tersedia secara online juga di: <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/aNr40DEK-dari-konflik-ambon-hingga-pengusiran-ahmadiyah> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Oktober 2019].
Prasetyo, Ferby Adi. (2019). "Harmoko" dalam *Tribun News*, pada 10 Oktober. Tersedia secara online juga di: <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/10/harmoko> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2020].
Raditya, Iswara N. (2010). "Harmoko: Menurut Petunjuk Bapak Presiden ..." dalam *KALAWARA*, pada 23 Februari. Tersedia secara online juga di: <https://dejavaraditya.wordpress.com/2010/02/23/harmoko-%E2%80%9Cmenurut-petunjuk-bapak-presiden> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2019].
Rahmah, Gina Siti, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori. (2016). "Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)" dalam *FACTUM*, Vol.5, No.2 [Oktober], hlm.201-219. Tersedia secara online juga di: http://jurnal.upi.edu/file/GINA_SITI_RAHMAH_S_MEK.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2019].
Rajab, Budi. (2004). "Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh" dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.6, No.3 [November], hlm.182-202.
Reeve, David. (2013). *Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika*. Depok, Jawa Barat: Komunitas Bambu, Terjemahan.
Renhoard, John Musa. (2019). "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi" dalam *SOCIETAS DEI*, Vol.06, No.1 [April], hlm.115-131. Tersedia secara online juga di: https://www.researchgate.net/publication/333711922_Politik_Identitas_Era_Orde_Baru_di_Indonesia_Memasuki_Era_Reformasi/fulltext [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2020].
Rizal, Jawahir Gustav. (2020). "Hari ini dalam Sejarah: Harmoko Minta Soeharto Mundur dan Mahasiswa Duduki Parlemen" dalam *KOMPAS.COM*, pada 18 Mei. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/121010665/hari-ini-dalam-sejarah-harmoko-minta-soeharto-mundur-dan-mahasiswa-duduki?page=all> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Juni 2020].
Rizkiyansyah, Beggy. (2019). "B.J. Habibie dan Kontribusi ICMI di Masa Orde Baru" dalam *KIBLAT: Berita, Visi, Investigasi*, pada 15 September. Tersedia secara online juga di: <https://www.kiblat.net/2019/09/15/bj-habibie-dan-kontribusi-icmi-di-masa-orde-baru> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2020].
Rohman. (2018). "Peran ICMI dalam Pemberdayaan Masyarakat". Tersedia secara online di: <https://media.neliti.com/media/publications/282540-peran-icmi-dalam-pemberdayaan-masyarakat-f39cf99b.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2019].
Rusliani, Hansen. (2018). "Ekonomi Syari'ah Solusi dalam Menghadapi Krisis Moneter (Perbandingan Malaysia – Indonesia)" dalam *AL-AMWAL*, Vol.10, No.2, hlm.199-214.
Salamah, Lilik. (2001). "Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia" dalam *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Th.XIV, No.2 [April], hlm.65-76. Tersedia secara online juga di: <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/06-lilik.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Oktober 2019].
Saputra, Angga Apip Wahyu. (2012). "Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia (1998)". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: <https://eprints.uny.ac.id/21766/2/Angga%20Apip%20WS.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Oktober 2019].
Schwarz, Adam. (1999). *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*. Australia: Allen & Unwin, 2nd edition.
Sekjen DPR RI [Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]. (1999). *Profil Ketua-ketua DPR RI: Sejak Tahun 1945 sampai dengan Agustus 1999*. Jakarta: Sekjen DPR RI.
Siddiq, Mohammad. (2019). "Profesionalisme Militer pada Pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid: Kajian Perbandingan Sosial-Historis" dalam *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.11, No.1 [Februari], hlm.21-33.
Simanjuntak, P.N.H. (2003). *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
Sitepu, V. (2015). "Rezim Soeharto: Kebebasan Pers Gelang Karet" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*, pada 26 Juni. Tersedia secara online juga di: https://www.kompasiana.com/vinsensius_sitepu/5500617fa33311e572510ae3/rezim-soeharto-kebebasan-pers-gelang-karet [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2019].
Sjamsuddin, Helius. (2016). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Sudrajat. (2019). "Bambang Soesatyo dan Jejak Harmoko di Golkar" dalam *Detik News*,

- pada 6 Juli. Tersedia secara online juga di: <https://news.detik.com/berita/d-4613385/bambang-soesatyo-dan-jejak-harmoko-di-golkar> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2020].
- Suhendra. (2017). "Ketika Indonesia Bertekuk Lutut kepada IMF" dalam *TIRTO.ID*, pada 31 Oktober. Tersedia secara online juga di: <https://tirto.id/ketika-indonesia-bertekuk-lutut-kepada-imf-czic> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Oktober 2019].
- Suparno, Basuki Agus. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suwirta, Andi. (2007). "Krisis Moneter, Gejala Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di Indonesia" dalam Abdul Razaq Ahmad & Andi Suwirta. *Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press.
- Syam, Firdaus. (2008). *Berhentinya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Harmoko*. Jakarta: Gria Media Prima.
- Tangkilisan, Yuda B. (2015). "Indonesia Mulia: Visi Dokter Soetomo tentang Kesejahteraan Rakyat, Moral Ekonomi, dan Modal Sosial" dalam *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, Volume 1(1), April, pp.9-22. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, APAKSI Bandung, and KEMENPORA RI Jakarta, p-ISSN 2407- 7348.
- Tanjung, Paisal. (2018). "Pemikiran Amien Rais tentang Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1999" dalam *JOM FISIP*, Vol.5, No.1 [April], hlm. 1-15. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/199569-none.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 28 Oktober 2019].
- Terbit, Nur. (2015). "Suatu Hari Bersama Harmoko" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*, pada 20 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/daeng2011/54f6fdf0a333118e198b4581/suatu-hari-bersama-harmoko> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2019].
- Utama, Andrew Shandy & Sandra Dewi. (2019). "Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Kepulauan Riau, Indonesia: Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning. Tersedia dan dimiliki oleh Penulis.
- Wijiasih, Runtut. (2018). "Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti" dalam *HARMONY*, Vol.1, No.1, hlm.1-13.
- Yuwanto. (2016). "Parlemen dan Demokratisasi: Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Transisi Demokrasi di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.2 [Maret], hlm.43-50.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].



Harmoko sebagai Tokoh Pers dan Politik

(Sumber: <https://www.kompas.com/tren>, 2/3/2020)

Harmoko merupakan seorang tokoh, yang berkecimpung dalam bidang pers dan politik. Kedudukan dan peranN Harmoko, baik dalam bidang pers maupun politik di Indonesia pada masa Orde Baru, sangat besar karena ia harus memutuskan kebijakan dalam kepemimpinannya yang saling berkaitan. Karier Harmoko, baik dalam dunia pers maupun politik, tidak lepas dari latar belakang kehidupannya yang panjang.